

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA DI PT. JAVA
TEXTILE GARMINDO DI SUKOHARJO**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

DEVI PERMATASARI

C 100 150 040

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA DI PT. JAVA TEXTILE
GARMINDO DI SUKOHARJO**

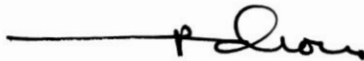
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DEVI PERMATASARI
C.100.150.040

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', written over a horizontal line.

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA DI PT. JAVA TEXTILE
GARMINDO DI SUKOHARJO**

Oleh:

DEVI PERMATASARI
C.100.150.040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

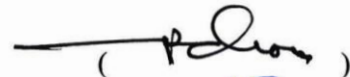


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 17 Juli 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)


()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 Juli 2019

Penulis



DEVI PERMATASARI

C.100.150.040

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA DI PT. JAVA TEXTILE GARMINDO DI SUKOHARJO

Abstrak

Dalam melakukan suatu pekerjaan seseorang pekerja harus lebih dulu membuat suatu perjanjian dengan pemberi kerja tentang apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki pekerja dan juga yang menjadi hak dan kewajiban para pemberi kerja untuk menghindari terjadinya kesewenangan, dengan adanya suatu perjanjian ini setidaknya hak-hak yang berhak didapatkan pekerja dilindungi oleh adanya perjanjian kerja ini, tetapi terkadang tidak sedikit seorang pekerja terpaksa menyetujui isi-isi dalam perjanjian kerja tersebut yang sebenarnya bertentangan dengan kemauannya dan merugikan diri si pekerja tersendiri hal tersebut terpaksa dilakukan si pekerja karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan hanya dengan pekerjaan ini lah mereka pikir mereka bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dibutuhkan dalam keseharian-hariannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan doktrinal. Penelitian ini meneliti tentang bagaimanakah perjanjian kerja antar calon pekerja dengan PT. Java Textile Garmino. Hasil penelitian menyatakan bahwa Subyek Hukum telah sesuai dengan pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Obyek Hukum telah sesuai dengan pasal 1 ayat 30 dan pasal 1 point 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hak dan Kewajiban para pihak telah sesuai dengan Pasal 77 ayat 1, Pasal 79 ayat 1, Pasal 80, Pasal 86 ayat 1, Pasal 88 ayat 1, Pasal 91 ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Wanprestasi telah sesuai dengan Pasal 95 ayat 2, Pasal 95(3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Hubungan Hukum, Ketenagakerjaan

Abstract

In doing a job, a worker must first make an agreement with the employer about what rights and obligations the worker has and also become the rights and obligations of the employer to avoid the occurrence of abuse, with the existence of this agreement at least the rights It is entitled to be protected by workers by this work agreement, but sometimes not a few workers are forced to agree to the contents of the work agreement which is actually contrary to his will and self-harm the worker is forced to do the work because they have no job and only with this work did they think they could survive to meet the daily needs of their daily lives. The method used in this study is a normative juridical method, with a doctrinal approach. This research examines how the employment agreement between prospective workers and PT. Java Textile Garmino. The results of the study stated that the Legal Subject was in accordance with article 1 paragraph 4 of Act number 13 of 2003 concerning Manpower, the Object of Law was in accordance with article 1 paragraph 30 and article 1 point 3 of Act number 13 of 2003 concerning Employment, Rights and Obligations the parties are in accordance with Article 77 paragraph 1, Article 79 paragraph 1, Article 80, Article 86 paragraph 1, Article 88 paragraph 1, Article 91 paragraph 1 of Act number 13 of 2003 concerning Labor, Default has been in accordance with Article 95 paragraph 2, Article 95 (3) Law number 13 of 2003.

Keywords: Employment Agreement, Legal Relations, Employment

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri termaksud di dalam kehidupannya, dan untuk menjalani kehidupannya manusia butuh memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder, untuk memenuhi kebutuhan itu manusia harus melakukan suatu pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan di dalam kehidupan kerja pun butuh orang lain untuk bisa menghasilkan sesuatu berupa barang atau jasa yang hasilnya bisa di gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping terpenuhinya berbagai kebutuhan manusia melalui kerja sebelum adanya hubungan hukum antara badan hukum (Perusahaan) sebagai pemberi kerja dan manusia sebagai pekerja atau buruh, yang nantinya ke 2 pihak akan mengikatkan dirinya dalam bentuk perjanjian kerja yang akan mengakibatkan munculnya hubungan kerja. yaitu pasal 1313 KUH Perdata yang berisi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Di dalam pasal 1601a KUH Perdata berbunyi “ Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. (Asri Wijayanti, 2009) Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, “Perjanjian kerja adalah Perjanjian antara pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

2. METODE

Subyek Hukum Menurut norma dan doktrin Perjanjian kerja di sebut sebagai pihak pertama. tenaga kerja dengan pengusaha sesuai dengan peraturan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di dalam pasal 1 ayat 4 yaitu pemberi kerja yang merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Subyek hukum yang sesuai perjanjian. Adapun subjek hukum di dalam perjanjian kerja di PT. Java Textile Garmino adalah Pimpinan/Wakil perusahaan sebagai pihak pertama dengan Karyawan sebagai

pihak kedua Perbandingan subyek hukum kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino dengan norma dan doktrin Subyek hukum dalam kontrak perjanjian kerja di PT.Java Textile Garmino terdapat dua pihak yakni pimpinan/wakil perusahaan sebagai pihak pertama dengan karyawan sebagai pihak kedua. Subyek hukum dalam norma dan doktrin menjelaskan subyek hukum secara umum sama dengan subyek hukum menurut kontrak perjanjian kerja yakni pimpinan/wakil perusahaan sebagai pihak pertama dan karyawan sebagai pihak kedua yang sudah terperinci mengenai subyek hukumnya. Argumentasi tentang perbandingan subyek hukum dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino dengan norma dan doktrin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Menurut norma dan doktrin yang ada tentang hak dan kewajiban dalam pekerja ada di Bab X Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 sebagai berikut; Pasal 77 (1) : Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja Pasal 79 (1) : Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh Pasal 80 Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Pasal 86(1) : Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas; Keselamatan dan kesehatan kerja Moral dan kesusilaan,dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama Pasal 88(1) : Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 91(1) ; Pengaturan pengupahan yang di tetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atas serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang di tetapkan perataran perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino Adapun hak dan kewajiban yang terdapat di dalam perjanjian kerja di PT.Java Textile Garmino terdapat di dalam pasal 3 yaitu tentang tata tertib dan kewajiban karyawan; Dalam melaksanakan pekerjaannya ,pihak kedua memahami sepenuhnya dan menerima baik pekerjaan yang di berikan oleh pihak pertama dan dengan ini pihak kedua berjanji untuk

mematuhi seluruh peraturan perusahaan,tata tertib dan persyaratan kerja yang di berlakukan oleh pihak pertama dan/ perusahaan di mana pihak kedua di tempatkan (terlampir dan dalam satu kesatuan dalam perjanjian itu) Menerima pekerjaan yang di berikan oleh pihak pertama berdasarkan target produksi yang di tentukan oleh pihak pertama. Pihak kedua berkewajiban memenuhi dan mematuhi standarisasi mutu kerja yang di tentukan oleh pihak pertama. Ketidak sesuaian proses kerja terhadap standarisasi mutu oleh pihak kedua maka di kategorikan terhadap pelanggaran mutu kerja dan akan di berikan sanksi sesuai peraturan dan/ tata tertib perusahaan. Ketidak tercapainya target produksi yang di tentukan oleh pihak pertama maka masuk dalam pelanggaran mutu kerja dan akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan dan tata tertib perusahaan. Pihak kedua bersedia mentaati segala peraturan dan tata tertib perusahaan. Apabila pihak kedua melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib maka akan di berikan sanksi sesuai peraturan dan/ tata tertib perusahaan. Selain itu terdapat kewajiban perusahaan di dalam perjanjian kerja yang sedang saya teliti terdapat di dalam pasal 5 yaitu; Pihak pertama akan memberikan kompensasi upah atas pekerjaan pihak kedua sampai dengan berakhirnya masa tugas pihak kedua,untuk perincian upah akan di atur secara terpisah dan masih merupakan satu kesatuan dalam perjanjian ini. Kompensasi yang di maksud pada ayat (1) di pengaruhi oleh kehadiran sesuai dengan peraturan dan/atau tata tertib perusahaan yang berlaku yang yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja ini. Premi kehadiran yang di maksud di pengaruhi oleh kehadiran,jika karyawan tidak masuk minimal satu kali dengan alasan apapun maka tidak akan mendapatkan premi kehadiran Kompensasi yang di terima pihak kedua setiap bulannya akan di potong : 1. Pajak penghasilan (Pph)pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku Apabila pihak kedua dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari terdapat kelebihan jam kerja maka pihak pertama akan memperhitungkannya sebagai jam kerja lembur, dalam hal ini pekerjaan lembur berdasarkan perintah dari atasan atau perusahaan yang di sesuaikan dengan kapasitas target produksi , Pekerja tidak masuk: Perbandingan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino dengan norma dan doktrin. Hak dan kewajiban yang di setuju pekerja/buruh sudah sesuai jelas dan terperinci dengan hak dan kewajiban yang

ada di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 bab X Argumentasi tentang Perbandingan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino dengan norma dan doktrin. Hak dan kewajiban para pihak yang ada di dalam kontrak perjanjian PT.Java Textile Garmino sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 Bab X yang mana menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak secara terperinci. Kesesuaian hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino dengan norma dan doktrin. Hak dan kewajiban para pihak di dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino sudah sesuai dengan norma dan doktrin yang ada. Argumentasi tentang Kesesuaian hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino dengan norma dan doktrin Hak dan kewajiban para pihak yang ada di dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karna di dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino berisikan tentang hak-hak yang dimiliki pekerja beserta kewajiban nya.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Menurut norma dan doktrin

Menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pengaturan tentang pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran gaji menurut undang-undang ketenagakerjaan di atur di dalam pasal 95 ayat (2) yaitu “pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, di kenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh.” Dan di dalam ayat (3) pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/ pekerja/buruh dalam pembayaran upah.maka dari itu bagi pengusaha yang dengan sengaja atau lalai terlambat membayar gaji pekerjanya maka di kenakan denda, di atur di dalam peraturan pemerintah.

3.2.2 Menurut Kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino

Di dalam perjanjian kerja di PT.Java Textile Garmino terdapat di dalam pasal 8 yaitu;“Apabila di dalam melaksanakan pekerjaannya,pihak kedua melakukan

kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian materill pihak pertama dan atau perusahaan dimana pihak kedua di tempatkan maka pihak kedua wajib mengganti penuh biaya kerugian tersebut.”

3.2.3 Perbandingan wanprestasi dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino

Wanprestasi menurut norma dan doktrin tidak membahas wanprestasi secara umum seperti yg ada di kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino

3.2.4 Argumentasi tentang Perbandingan wanprestasi dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino

Wanprestasi menurut norma dan doktrin lebih mengarah kepada keterlamabatan pemberian upah sedangkan di dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino wanprestasi di bahas secara umum dan jelas.

3.2.5 Kesesuaian wanprestasi dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino dengan norma dan doktrin

Wanprestasi yang ada di dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino sudah sesuai dengan norma dan doktrin yang ada.

3.2.6 Argumentasi tentang Kesesuaian wanprestasi dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino dengan norma dan doktrin

Wanprestasi yang ada di dalam kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino sudah sesuai dengan norma dan doktrin yang ada di karenakan dari isi kontrak perjanjian kerja PT.Java Textile Garmino maupun norma dan doktrin yang ada secara keseluruhan membahas tentang adanya perbuatan kelalaian atau tidak terpenuhnya kewajiban dari salah satu pihak, di mana akibat hukumnya adalah mengganti penuh biaya kerugian yang sudah di perbuatnya.

4. PENUTUP

Pengaturan tentang aspek Subyek Hukum telah sesuai dengan pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Obyek Hukum telah sesuai dengan pasal 1 ayat 30 dan pasal 1 point 3 Undang-undang nomor 13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hak dan Kewajiban para pihak telah sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 , Pasal 79 ayat 1, Pasal 80, Pasal 86 ayat 1 , Pasal 88 ayat 1 , Pasal 91 ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Wanprestasi telah sesuai dengan Pasal 95 ayat 2, Pasal 95(3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

DAFTAR PUSTAKA

Asyhadie Zaeni, 2007, *Hukum Kerja :Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Hamzah Andi, 1986, Kamus hukum, Jakarta;Ghalia Indonesia

Manulang H.sendjun, 1995, Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan indonesia, Jakarta:rineka cipta

Muhammad Abdulkadir, 1992, Perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan, Jakarta:PT.citra aditya bakti

Muhtarom M., 2002, Hukum Kontrak (Jilid I), Surakarta

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*,Jakarta: Rajawali Pers,

S I Ketut Satria Wiradharma., Wanprestasi terhadap pelaksanaan kontrak kerja oleh klub terhadap pemain sepak bola

Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta:Intermasa

Wardiono Kelik, 2014, Perjanjian baku,klausul eksonerasi dan konsumen, Yogyakarta: Penerbit ombak,

Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.